



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai landasan teoritis yang berisi teori-teori yang relevan dengan topik yang akan diteliti untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Peneliti juga menyajikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan. Selanjutnya, peneliti akan menjabarkan kerangka pemikiran yang berisi penjelasan mengenai hubungan atau keterkaitan antar variabel yang akan diteliti serta indikator-indikator yang akan digunakan dalam melakukan penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. *Legitimacy Theory* (Teori Legitimasi)

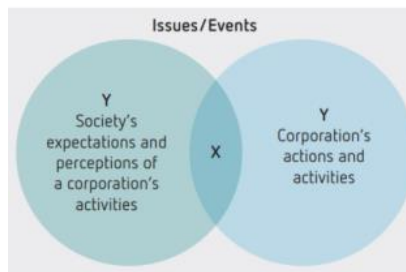
Teori legitimasi (*Legitimacy Theory*) adalah teori yang berfokus pada interaksi antara perusahaan dan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat dan harus memperhatikan norma-norma sosial kemasyarakatan. Kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate (sah). Teori legitimasi didasarkan pada pemahaman kontrak sosial yang tersirat antara lembaga sosial dengan masyarakat untuk mencapai tujuan agar selaras dengan masyarakat luas. Teori legitimasi pertama kali dicetuskan oleh Dowling dan Pfeffer pada tahun 1975 (Hidayah et al., 2023). Teori ini menganggap bahwa masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan perusahaan dalam waktu jangka panjang.

Teori legitimasi dapat digunakan untuk memahami aksi ataupun aktivitas suatu perusahaan yang berhubungan dengan isu-isu lingkungan dan sosial. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan teori

legitimasi adalah ukuran perusahaan, jenis industri, tekanan media serta kinerja lingkungan perusahaan. Dalam buku Deegan (2023:433), O'Donovan (2002) menjelaskan kesenjangan legitimasi melalui diagram, yaitu Gambar 2.1. Area X, menandakan kesesuaian aktivitas perusahaan dan ekspektasi masyarakat. Tujuan perusahaan adalah untuk memastikan area X sebesar mungkin, mengurangi legitimacy gap.

Gambar 2. 1

Legitimasi Perusahaan



Sumber: O'Donovan (2002) dalam Deegan (2023:433)

2. Stakeholders Theory (Teori Pemangku Kepentingan)

Teori pemangku kepentingan pertama kali diperkenalkan oleh Freeman dan David (1983) yang menjelaskan bahwa konsep pemangku kepentingan di dalam organisasi dapat digunakan untuk memahami tugas-tugas dari para dewan direksi. Tugas utama yang diemban diantaranya mengelola dan mengintegrasikan hubungan dan kepentingan pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok dan masyarakat dengan tujuan mencapai penciptaan nilai yang positif bagi perusahaan. Merupakan tugas eksekutif untuk mengelola dan membentuk hubungan ini untuk menciptakan nilai sebanyak mungkin bagi pemangku kepentingan dan untuk mengelola distribusi nilai tersebut.

Jika kepentingan para pemangku kepentingan bertentangan satu sama lain, dewan direksi harus menemukan cara untuk memikirkan kembali masalah agar kebutuhan kelompok





pemangku kepentingan yang luas dapat terpenuhi. (Ghozali, 2020). Definisi pemangku kepentingan telah berkembang secara substansial selama empat puluh tahun terakhir. Pada awalnya, pemegang saham dianggap sebagai satu-satunya pemangku kepentingan organisasi. Pandangan ini didasarkan pada argumen yang disampaikan Friedman (2002) yang mengatakan bahwa objektif utama organisasi adalah memaksimalkan kesejahteraan pemiliknya.

Namun demikian, Freeman dan David (1983) tidak setuju dengan pandangan ini dan memperluas makna pemangku kepentingan dengan memasukkan lebih banyak konstituen, seperti kelompok yang dianggap tidak menguntungkan (*adversarial group*) termasuk di dalamnya pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan para pembuat kebijakan (pemerintah). Dalam bukunya yang berjudul *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Freeman (2010) mendefinisikan pemangku kepentingan perusahaan sebagai “kelompok apapun atau individu dimana dapat terdampak atau telah terdampak dengan pencapaian yang dilakukan oleh perusahaan.”

Selanjutnya, Chandler (2021) mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai sebuah individu atau organisasi yang terdampak oleh perusahaan (baik secara sukarela atau tidak), dan memiliki kapasitas dan kepentingan dalam memengaruhi perusahaan. Dalam mengidentifikasi dan memahami kepentingan dari pemangku kepentingan, perusahaan dapat membaginya menjadi tiga kelompok terpisah: pemangku kepentingan organisasi (internal), serta pemangku kepentingan ekonomi dan sosial (eksternal). Secara bersama-sama, ketiga jenis pemangku kepentingan tersebut membentuk satu set lingkaran konsentris (saling terkait) dengan perusahaan dan organisasi internal berada di tengah dengan lingkaran luar yang lebih besar yang mencakup pemangku kepentingan dari sisi ekonomi. Kemudian kedua lingkaran tersebut termasuk dalam satu lingkaran lebih luas lagi yang menggambarkan aktivitas perusahaan dan pemangku kepentingan dari sisi sosial.



Dengan klasifikasi tersebut, seluruh peran dalam ketiga kelompok pemangku kepentingan secara ideal saling melengkapi satu sama lain. Pembagian kelompok ini juga diungkapkan terlebih dahulu oleh *Committee for Economic Development* (CED) pada periode awal tahun 1970-an seperti yang ditulis Solihin (2009). Meningkatnya perhatian terkait partisipasi sosial bisnis mendorong perkembangan konsep stakeholder. (Freeman & David, 1983) menjelaskan dua definisi stakeholder, yaitu pengertian yang luas, termasuk kelompok yang bersahabat atau tidak, dan dalam arti yang sempit, yang mencakup inti yang lebih spesifik dari definisi yang disampaikan Stanford Research Institute, sebagai berikut:

- a. Arti Luas (The Wide Sense of Stakeholder), yaitu kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi, meliputi kelompok kepentingan publik, lembaga pemerintah, asosiasi perdagangan, pesaing, serikat pekerja, karyawan, pelanggan, pemegang saham, dan lainnya.
- b. Arti Sempit (The Narrow Sense of Stakeholder), yaitu kelompok atau individu yang di mana organisasi bergantung padanya untuk keberlanjutan, seperti karyawan, pelanggan, pemasok tertentu, lembaga pemerintah utama, pemilik saham, lembaga keuangan tertentu, dan lain-lain.

Gambar 2. 2

Power Pemangku Kepentingan

Power Stake	Formal or Voting	Economic	Political
Equity	<ul style="list-style-type: none"> • Stockholders • Directors • Minority interests 		<ul style="list-style-type: none"> • Dissident stockholders
Economic		<ul style="list-style-type: none"> • Suppliers • Debt holders • Customers • Unions 	<ul style="list-style-type: none"> • Local governments • Foreign governments • Consumer groups • Unions
Influencers	<ul style="list-style-type: none"> • Government • SEC • Outside directors 	<ul style="list-style-type: none"> • EPA/OSHA 	<ul style="list-style-type: none"> • Nader's Raiders • Government • Trade associations

Sumber: Freeman & Reed (1983:94)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



memaksa manajemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dewan komisaris berperan sebagai pengawas independen yang mewakili kepentingan pemegang saham.

4. *Resource-based view (RBV) Theory*

Teori manajemen bisnis yang menyatakan bahwa sumber daya dan kemampuan internal perusahaan adalah dasar untuk keunggulan kompetitif dan kinerja perusahaan. Teori RBV berpendapat bahwa perusahaan yang sukses akan bersaing di masa depan dengan mengembangkan kemampuan yang khas dan unik, yang mungkin tidak berwujud. RBV dapat membantu perusahaan dalam: Menganalisis peluang dan menetralkan ancaman, Menentukan sumber daya strategis yang tersedia, Mencapai keunggulan bersaing berkelanjutan. RBV pertama kali dipelopori oleh Wernerfelt pada tahun 1984 (Space, 2013). Model RBV menggambarkan bagaimana sumber daya berhubungan dengan strategi perusahaan, di mana perusahaan harus memperhatikan nilai sumber daya, kelangkaan, sulit ditiru, dan mampu mengeksplorasi-nya lebih mendalam.

5. *Triple Bottom Line*

Triple Bottom Line (disingkat TBL atau 3P: *people, profit, planet*) merupakan salah satu konsep yang paling umum digunakan ketika meneliti mengenai keberlanjutan. Konsep ini diperkenalkan oleh Elkington (1993) dan sejak saat itu menyita perhatian dari semua peneliti yang tertarik untuk menyajikan analisis mengenai keberlanjutan, baik dalam skala penelitian kecil maupun penelitian besar. Konsep TBL tidak hanya digunakan pada ilmu manajemen, tetapi juga dalam ilmu ekonomi, wawasan lingkungan, serta tata kelola.

Luasnya penggunaan konsep TBL muncul dari gelombang ketidakpuasan atas paradigma era politik ekonomi yang mulai ditinggalkan dimana menitikberatkan pada

Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menghasilkan keuntungan semata bagi para pemegang saham dan kinerja yang didasarkan oleh aktivitas ekonomi yang dituangkan dalam laporan keuangan. Isu-isu kritis yang bermunculan seperti ancaman kerusakan lingkungan, standar upah buruh, meningkatnya kemiskinan dan korupsi mendorong masyarakat untuk bersatu teguh dan menyuarakan permasalahan yang terjadi agar mampu menemukan solusi yang tepat. (Zaharia dan Zaharia, 2021)

Dari sekian banyaknya usaha yang menyuarakan isu lingkungan sebagai konsep baru dalam menentukan arah perusahaan, munculah *SustainAbility*, salah satu penyedia jasa konsultan yang memperjuangkan isu lingkungan dimana pada saat itu didirikan oleh John Elkington dan Julia Hailes pada tahun 1987. Di tahun yang sama pula terbit laporan The "Brundtland Commission" yang berjudul *Our Common Future* yang ditulis ulang oleh Barnaby (1987) sebuah manifesto yang menjadi salah satu pemikiran awal atas lahirnya konsep keberlanjutan dengan tulisan yang menyampaikan mengenai pentingnya menumbuhkan kesadaran akan tindakan proaktif dalam masalah lingkungan dan sosial untuk diagendakan pada setiap lini bisnis. Hanya manusia, makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan keberlanjutan, untuk memastikan bahwa kemanusiaan mampu menjawab kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi penerus di masa mendatang. (Barnaby, 1987)

6. *Global Reporting Initiative (GRI)*

GRI adalah sebuah organisasi independen internasional yang mempelopori pelaporan keberlanjutan sejak 1997. GRI membantu pelaku usaha dan pemerintah secara global untuk memahami dan penyampaian masalah penting terkait keberlanjutan seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, tata kelola dan kesejahteraan sosial yang dapat memberikan dampak

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hal Cipta Dilindungi Undang-undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



langsung untuk menciptakan ekonomi, lingkungan, dan kehidupan sosial yang bermanfaat bagi semua orang.

GRI *Sustainability Reporting Standards* dikembangkan dengan kontribusi nyata dari para pemangku kepentingan dan didasarkan pada kepentingan umum. Kantor Sekretariat GRI berpusat di Amsterdam, Belanda untuk menangani wilayah Eropa serta memiliki tujuh kantor regional lainnya yang tersebar di seluruh dunia, diantaranya Johannesburg (Afrika), Singapura (ASEAN), Sao Paulo (Brazil), Hong Kong (*Greater China Region*), Bogota (Amerika Latin), New York (Amerika Utara), dan New Delhi (Asia Selatan).

GRI dikelola oleh *Global Sustainability Standards Board* (GSSB) yang bertanggung jawab untuk mengatur standar yang diterima secara global bagi pelaporan keberlanjutan. GSSB beroperasi di bawah *Terms of Reference* (GRI, 2018) untuk memantau perkembangan atas isu keberlanjutan yang diperlukan. Anggota GSSB direpresentasikan dari beragam kombinasi keahlian teknis, pengalaman yang luas dan keberagaman sudut pandang pemangku kepentingan serta melaksanakan tugas mereka sesuai dengan prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh GSSB.

7. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

a. Pengertian Keberlanjutan (*Sustainability*)

Menurut The Brundtland Commission, sebuah badan investigatif yang didirikan oleh United Nation (UN) pada tahun 1980 dalam buku yang ditulis oleh Scott (2017) mendefinisikan keberlanjutan sebagai sebuah perkembangan yang mempertemukan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya Scott (2017) mendefinisikan secara mandiri bahwa keberlanjutan merupakan



sebuah proses atau aktivitas jangka panjang berkesinambungan yang menyebabkan atau memperlambat sesuatu untuk berlanjut seiring berlalunya waktu; sebuah proses atau aksi yang menjaga sesuatu tetap ada atau tetap berjalan. Hal tersebut dapat diambil intisarinya bahwa dalam konteks bisnis, keberlanjutan mencakup beragam proses dan aktivitas yang menjaga sebuah usaha tetap bertahan seiring waktu.

The Oxford English Dictionary menjelaskan makna ekologi dari keberlanjutan sebagai suatu, berkaitan dengan, atau bentuk aktivitas ekonomi dan budaya manusia yang didesain untuk tidak menurunkan tingkat kelestarian alam, terutama mencegah kepunahan secara jangka panjang atas sumber daya alam yang tersedia (Simpson dan Weiner, 2009). Robertson (2021) menjelaskan keberlanjutan merujuk pada suatu sistem dan proses yang mampu beroperasi dan bertahan dengan sendirinya dalam kurun waktu yang lama.

Konsep dari sebuah sistem sangat mendasar bagi keberlanjutan dimana ia secara terorganisasi bersama-sama membentuk elemen yang saling terkait. Bumi sebagai tempat tinggal manusia merupakan sistem, terbuat dari berbagai macam ilmu biofisika (*biophysics*) dalam jaringan tiga dimensional yang sangat kompleks terhubung satu sama lain. Bumi sebagai planet yang sangat kaya akan beragam ekologi berbeda, termasuk diantaranya padang pasir, padang rumput, hutan, sungai, lautan, kedalaman tanah, dan lapisan atmosfer. Bidang apa pun yang akan manusia pelajari, maka ia akan selalu menemukan suatu pola yang mampu menghubungkan keseluruhan ekologi tersebut.

b. Prinsip Laporan Keberlanjutan dalam Standar GRI

Menurut Global Sustainability Standards Board (2016), semua organisasi sebagai pemegang peran kunci diharapkan mampu menyumbang kontribusi positif dan negatif dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Pelaporan keberlanjutan sebagaimana digambarkan oleh



GRI merupakan praktik pelaporan setiap perusahaan secara luas mengenai aktivitas ekonomi, lingkungan, dan sosial. Oleh karena itu termasuk kontribusinya baik positif maupun negatif terhadap tujuan pembangunan keberlanjutan. Melalui proses pelaporan keberlanjutan, perusahaan diharapkan mampu mengidentifikasi topik prioritas pada ekonomi, lingkungan, dan masyarakat serta mengungkapkannya sesuai dengan standar yang diterima secara mendunia. Standar GRI merupakan bahasa universal untuk seluruh perusahaan di dunia dan para pemangku kepentingan sehingga dampak tersebut dapat dikomunikasikan dan dipahami serta meningkatkan komparabilitas (keterbandingan) secara umum dan kualitas informasi mengenai dampak yang terjadi sehingga terciptanya akuntabilitas dan transparansi perusahaan yang lebih baik.

Pelaporan keberlanjutan yang disusun berdasarkan Standar GRI wajib memberikan gambaran yang wajar dan seimbang dari sumbangsih positif maupun negatif perusahaan terhadap tujuan pembangunan keberlanjutan. Informasi yang tersedia dalam pelaporan keberlanjutan membantu para pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam menyampaikan sudut pandang dan membuat keputusan terinformasi mengenai kontribusi perusahaan dalam tujuan pembangunan keberlanjutan. Standar GRI disusun sebagai serangkaian standar yang saling terkait. Standar-standar ini telah ditingkatkan terutama dimaksudkan untuk membantu perusahaan menyiapkan laporan keberlanjutan yang dilandasi oleh Prinsip-Prinsip Pelaporan yang berfokus pada topik yang material.

Laporan yang disusun berdasarkan Standar GRI menampilkan bahwa laporan tersebut menyajikan gambaran lengkap dan seimbang tentang topik material perusahaan dan dampak terkait serta bagaimana dampak-dampak tersebut dikelola. (Global Sustainability Standards Board, 2016). Laporan sesuai Standar GRI dapat disusun sebagai laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri (*standalone*), atau merujuk informasi yang diungkapkan dalam berbagai lokasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian GIE



dan format (misalnya, berbentuk elektronik atau media cetak). Seluruh laporan yang diproduksi sesuai dengan Standar GRI diwajibkan mencantumkan indeks isi GRI, yang disajikan dalam satu tempat dan termasuk URL atau nomor halaman untuk seluruh pengungkapan yang disajikan. Dalam menggunakan Standar GRI, suatu organisasi dapat memilih menggunakan Standar GRI sebagai satu rangkaian utuh atau hanya menggunakan sebagian dari Standar yang dipilih atau bagian dari isinya untuk melaporkan informasi yang spesifik, asalkan Standar yang relevan telah dirujuk dengan benar. (Global Sustainability Standards Board, 2021)

Prinsip-Prinsip Pelaporan bersifat fundamental dalam pencapaian berkualitas tinggi pada pelaporan keberlanjutan. Setiap perusahaan diharapkan mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Pelaporan jika ingin diakui bahwa laporan keberlanjutan telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Prinsip-Prinsip Pelaporan dibagi menjadi dua kelompok: prinsip untuk memaknai isi laporan dan prinsip-prinsip untuk memaknai kualitas laporan. Prinsip isi laporan memberikan panduan bagi perusahaan untuk memutuskan bagian laporan mana yang akan dicantumkan. Hal tersebut melibatkan pertimbangan tentang aktivitas, dampak yang ditimbulkan, ekspektasi perusahaan, serta kebutuhan para pemangku kepentingannya.

Prinsip-Prinsip Pelaporan dalam memaknai kualitas laporan memberikan opsi untuk memastikan penyajian yang tepat dalam kualitas informasi laporan keberlanjutan. Kualitas informasi penting untuk memungkinkan para pemangku kepentingan untuk membuat penilaian yang valid dan masuk akal mengenai suatu perusahaan serta mengambil keputusan yang tepat (Global Sustainability Standards Board, 2021).

Tabel 2.1. Prinsip Pelaporan Berdasarkan Isi dan Kualitas Standar GRI

Prinsip-Prinsip Pelaporan untuk menentukan isi laporan	Prinsip-Prinsip Pelaporan untuk menentukan kualitas laporan
--	---

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Hasil Cipta Milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hasil Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1. Inklusivitas Pemangku Kepentingan	1. Akurasi
2. Konteks Keberlanjutan	2. Keseimbangan
3. Materialitas	3. Kejelasan
4. Kelengkapan	4. Keterbandingan
	5. Keandalan
	6. Ketepatan waktu

Sumber: GRI (2021)

Berikut ini akan disajikan mengenai penjelasan sesuai dengan Prinsip-Prinsip Pelaporan yang ditulis oleh *Global Sustainability Standards Board* (2021).

(19) Empat Prinsip Dalam Menentukan Isi Laporan

(a) Pemangku Kepentingan (*stakeholder inclusiveness*)

Organisasi perlu melakukan identifikasi yang cermat terhadap pemangku kepentingan yang relevan dan merumuskan strategi untuk memenuhi harapan serta keinginan mereka.

Pemangku kepentingan ini mencakup individu atau kelompok yang memiliki kepentingan langsung, seperti investor, karyawan, pelanggan, serta entitas yang memiliki hubungan dengan organisasi. Hubungan yang terjalin antara organisasi dan pemangku kepentingan bersifat saling mempengaruhi, sehingga sangat penting untuk memahami dinamika ini dalam konteks pengambilan keputusan strategis (Freeman, 2010)

Interaksi yang konstruktif dengan pemangku kepentingan dapat berfungsi sebagai kunci utama dalam menentukan arah dan isi laporan keberlanjutan organisasi. Dengan memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, organisasi dapat menciptakan laporan yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pelibatan pemangku kepentingan bukan



hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan strategi yang penting untuk mencapai keberlanjutan yang lebih baik dalam operasional organisasi (Elkington, (1997)

(b) Konteks Keberlanjutan

Laporan keberlanjutan seharusnya menyajikan perspektif dan kinerja organisasi dalam kerangka keberlanjutan yang lebih luas. Dalam hal ini, organisasi harus menjelaskan berbagai upaya dan kinerja yang telah dilaksanakan, serta rencana ke depan untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya ini perlu dilakukan dalam berbagai skala, mulai dari sektor lokal hingga regional dan global, sehingga mencerminkan komitmen organisasi terhadap keberlanjutan yang menyeluruh (UNESCO, 2015)

Penting untuk dicatat bahwa penyajian informasi yang hanya berfokus pada kinerja dan upaya internal organisasi tidak cukup untuk menunjukkan pemahaman yang komprehensif tentang konteks keberlanjutan. Oleh karena itu, organisasi harus memperluas cakupan analisis dan laporan mereka untuk mencakup dampak yang lebih luas, termasuk kontribusi terhadap tantangan global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan kemiskinan. Dengan demikian, laporan keberlanjutan dapat berfungsi sebagai alat untuk mengkomunikasikan komitmen dan kontribusi organisasi terhadap keberlanjutan secara lebih efektif (Global Sustainability Standards Board, 2016).

(c) Materialitas (*Materiality*)

Informasi yang dianggap material merujuk pada informasi yang memiliki signifikansi tinggi bagi pemangku kepentingan dan berperan penting dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks laporan keberlanjutan, informasi ini sangat terkait dengan pemahaman organisasi mengenai konteks keberlanjutan serta dampak yang ditimbulkannya terhadap

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



pemangku kepentingan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Kualitas informasi material ini sangat bergantung pada relevansinya bagi berbagai pihak yang berkepentingan, yang mencakup baik pemangku kepentingan internal maupun eksternal (SASB, 2018).

Penentuan informasi material dilakukan melalui praktik internal organisasi yang mempertimbangkan semua tahapan kegiatan. Hal ini meliputi analisis mendalam terhadap kepentingan pemangku kepentingan, baik yang berasal dari dalam organisasi, seperti karyawan dan manajemen, maupun dari luar organisasi, seperti pelanggan, masyarakat, dan investor. Penting untuk dicatat bahwa informasi yang dianggap signifikan oleh pemangku kepentingan internal belum tentu memiliki tingkat kepentingan yang sama bagi pemangku kepentingan eksternal, dan sebaliknya. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan evaluasi yang cermat untuk mengidentifikasi dan menetapkan prioritas informasi yang relevan untuk disajikan dalam laporan keberlanjutan (Global Sustainability Standards Board, 2016).

Dalam proses pelaporan, organisasi harus membuat keputusan strategis mengenai informasi mana yang akan diprioritaskan dan disajikan, mengingat bahwa informasi material dapat bervariasi antar organisasi dan bahkan antar industri. Variasi ini mencerminkan perbedaan konteks operasional, tantangan yang dihadapi, serta harapan pemangku kepentingan. Dengan demikian, pengelolaan informasi material yang efektif akan membantu organisasi dalam menciptakan laporan keberlanjutan yang lebih relevan, transparan, dan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan (Eccles et al., 2014).

(d) Kelengkapan (*Completeness*)

Laporan keberlanjutan harus mencakup semua aspek material beserta batasan-batasannya, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak



organisasi terhadap dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penting untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan memiliki akses yang memadai terhadap laporan yang disusun oleh organisasi. Kelengkapan informasi ini bukan hanya berkaitan dengan ruang lingkup dan batasan, tetapi juga dengan periode waktu yang relevan dalam pelaporan. Dengan demikian, laporan harus mencerminkan seluruh aspek operasional organisasi yang dapat mempengaruhi pemangku kepentingan (Global Sustainability Standards Board, 2016).

Dimensi kelengkapan juga berarti bahwa informasi yang disajikan dalam laporan harus cukup memadai dan relevan, sehingga pembaca dapat memahami konteks dan maksud dari informasi tersebut secara utuh. Informasi yang tidak lengkap atau tidak jelas dapat menimbulkan kebingungan dan mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan yang disampaikan. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa semua informasi yang material dan relevan disertakan dalam laporan, serta disajikan dengan cara yang mudah dipahami (SASB, 2018).

Dengan memperhatikan aspek kelengkapan, organisasi tidak hanya memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga berkontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas. Ini penting untuk membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan dan meningkatkan reputasi organisasi secara keseluruhan. Laporan yang lengkap dan informatif akan memberikan nilai tambah, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi pemangku kepentingan yang mengandalkan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan yang berkelanjutan (Eccles et al., 2014).

(2) Prinsip Untuk Menentukan Kualitas Laporan

(a) Perbandingan (*comparability*)



Organisasi diharuskan untuk memilih, mengkompilasi, dan menyajikan informasi dengan cara yang konsisten dan sistematis. Penyajian informasi harus memberikan gambaran yang cukup jelas agar pembaca dapat memahami segala perubahan yang terjadi. Proses perbandingan ini menjadi sangat penting untuk mengevaluasi kinerja organisasi dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Evaluasi dapat dilakukan dengan membandingkan kinerja organisasi dalam periode sebelumnya, dengan target yang telah ditetapkan, tujuan yang ingin dicapai, atau jika memungkinkan, dengan industri sejenis. Dalam konteks ini, perbandingan tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk merefleksikan kemajuan dan tantangan yang dihadapi organisasi (IAESB, 2020)

Menurut kerangka kerja yang diusung oleh The International Accounting Standards Board (IASB), kualitas informasi dalam laporan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pembaca untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara dua fenomena yang dianalisis. Oleh karena itu, situasi yang serupa harus disajikan dengan informasi yang seragam, sementara situasi yang berbeda perlu disajikan dengan informasi yang sesuai dengan konteksnya. Hal ini menekankan pentingnya konsistensi dan relevansi dalam penyajian data, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pemahaman serta pengambilan keputusan yang lebih tepat bagi pemangku kepentingan (IASB, 2018)

(b) Keseimbangan (*Balance*)

Laporan organisasi seharusnya menyajikan baik aspek positif maupun negatif dari kinerja yang dicapai, guna memberikan informasi yang menyeluruh dan komprehensif mengenai keseluruhan kinerja. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak mengandung bias, serta menghindari seleksi informasi yang cenderung menguntungkan satu pihak. Dengan demikian, laporan akan memberikan gambaran yang lebih

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



objektif dan realistis, memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi kinerja dengan lebih baik (GRI., 2021)

Selain itu, penyajian yang seimbang juga berfungsi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam laporan. Ketika laporan mencakup semua aspek kinerja, termasuk tantangan yang dihadapi, hal ini dapat membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan bukti. Dengan demikian, keseimbangan dalam penyajian informasi bukan hanya sekadar prinsip pelaporan, tetapi juga merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas organisasi di mata publik (International Integrated Reporting Council, 2021).

(c) Akurat (*accuracy*)

Informasi yang disajikan dalam laporan organisasi harus memenuhi kriteria akurasi, yang mencakup ketepatan dan keandalan, agar pembaca dapat memperoleh gambaran yang benar tentang kinerja organisasi. Akurasi tidak hanya berkaitan dengan keabsahan data, tetapi juga mencakup detail yang cukup untuk memberikan konteks yang relevan kepada pemangku kepentingan. Dengan informasi yang akurat, pembaca dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan organisasi. (IAASB, 2020)

Penting untuk dicatat bahwa penyajian informasi yang akurat dapat bervariasi tergantung pada jenis informasi yang disampaikan serta tujuan dari setiap informasi tersebut, baik dalam aspek kualitatif maupun kuantitatif. Misalnya, data kualitatif mungkin memerlukan penjelasan yang lebih mendalam untuk menangkap nuansa dan konteks, sedangkan data kuantitatif harus disajikan dengan jelas dan terukur untuk mendukung analisis yang objektif. Dengan memperhatikan berbagai aspek ini, organisasi dapat memastikan bahwa laporan yang



dihasilkan tidak hanya akurat, tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan (International Federation of Accountants, 2021)

(d) Ketepatan waktu (*timeliness*)

Ketepatan waktu dalam penyajian informasi merupakan salah satu aspek krusial yang harus diperhatikan oleh organisasi. Laporan harus disusun dan disampaikan secara berkala agar dapat diakses oleh pemangku kepentingan pada saat yang tepat, terutama ketika pengambilan keputusan diperlukan. Informasi yang disajikan secara tepat waktu memungkinkan pemangku kepentingan untuk memiliki akses kepada data terkini, yang sangat penting dalam konteks dinamika bisnis yang cepat berubah (FASB, 2021).

Selain itu, ketepatan waktu tidak hanya meningkatkan relevansi informasi, tetapi juga berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas organisasi. Dengan menyediakan laporan yang tepat waktu, organisasi menunjukkan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan informasi pemangku kepentingan, sehingga memperkuat hubungan dan kepercayaan dengan mereka. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengembangkan sistem yang efisien dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi, untuk memastikan bahwa laporan yang dihasilkan selalu dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dalam konteks pengambilan keputusan (IASB, 2021)

(e) Kejelasan (*clarity*)

Kejelasan merupakan elemen penting dalam penyajian informasi yang harus diperhatikan oleh organisasi. Informasi yang disampaikan harus dapat dimengerti dan diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan. Penyajian informasi yang jelas tidak hanya membantu dalam memahami data yang disajikan, tetapi juga meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan untuk menganalisis dan mengambil keputusan berdasarkan informasi

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tersebut. Oleh karena itu, organisasi perlu mempertimbangkan penggunaan bahasa yang sederhana, struktur yang logis, serta visualisasi data yang efektif untuk memastikan bahwa informasi dapat dipahami dengan baik (IFAC, 2020).

Lebih jauh lagi, penyajian informasi harus bersifat komprehensif, sehingga pembaca dapat memahami makna dan konteks dari informasi yang disediakan. Hal ini mencakup penyediaan latar belakang yang memadai, definisi istilah yang digunakan, serta penjelasan mengenai data yang ditampilkan. Dengan memperhatikan aspek kejelasan ini, organisasi tidak hanya memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diakses, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan informatif oleh para pemangku kepentingan (IASB, 2021)

(f) Keandalan (*reliability*)

Keandalan informasi adalah salah satu aspek krusial yang harus diperhatikan oleh organisasi dalam proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyajian data. Untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat diuji dan dipercaya oleh pembaca, organisasi perlu menerapkan prosedur yang ketat dalam setiap tahap penyiapan laporan. Proses ini mencakup evaluasi yang mendalam terhadap informasi yang disampaikan, pengecekan kesesuaian dengan pedoman pelaporan yang relevan, seperti G4, serta penyediaan dokumen pendukung yang memadai. Dengan demikian, keandalan informasi dapat ditingkatkan melalui proses penjaminan (*assurance*) yang sistematis dan transparan (KPMG, 2020).

Proses penjaminan yang dilakukan oleh pihak independen memainkan peran penting dalam memastikan bahwa informasi yang disajikan tidak hanya akurat, tetapi juga bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dengan adanya evaluasi yang objektif dan independen, kepercayaan pembaca terhadap laporan yang dihasilkan akan meningkat. Hal ini

akan berdampak positif bagi organisasi, seperti kemampuannya untuk menarik minat investor dan meningkatkan reputasi di pasar. Kepercayaan yang tinggi terhadap informasi yang disajikan tidak hanya memperkuat posisi organisasi, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan dalam jangka panjang (IIRC, 2021).

Langkah – Langkah tersebut dapat dijelaskan pada Gambar 2.3 yang dikemukakan dan digambarkan oleh Gunawan (2015)

Gambar 2.3. Desain Prinsip Laporan Keberlanjutan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sumber Gambar: Gunawan (2015)

B. Penelitian Terdahulu (*Research Lags*)

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait dengan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) suatu perusahaan, materialitas dari laporan keberlanjutan dengan berbagai objek penelitian. Dalam *Handbook of Research Methods in Corporate Social Responsibility*, 349-363 (2017) dengan judul *Content Analysis Method: A Proposed Scoring for Quantitative and Qualitative Disclosures* tahun 2014 peneliti Juniati Gunawan dan Kumalawati Abadi (2017) mengungkapkan hasil Kinerja ekonomi memperoleh skor tertinggi, baik untuk pendekatan kuantitatif maupun kualitatif dibandingkan dengan aspek lingkungan dan social, menggunakan Variabel Dependennya *Sustainability Reporting (Y)* dan Variabel Independennya *Pengungkapan kuantitatif dan kualitatif untuk aspek ekonomi (X1), Pengungkapan kuantitatif dan kualitatif untuk aspek lingkungan (X2) serta Pengungkapan kuantitatif dan kualitatif untuk aspek sosial (X3).*

Peneliti Agnes Zsoka dan Eva Vajkaf (2018) pada judul *Corporate Sustainability Reporting: Scrutinising The Requirements of Comparability, Transparency and Reflection of Sustainability Performance* menggunakan Variabel Dependen *Sustainability Reporting (Y)* dan Variabel Independen 10 Prinsip Isi dan Kualitas ($X_1 - X_{10}$) mengungkapkan :

1. *Stakeholder inclusiveness*. Pemilik, pemegang saham dan investor saat ini menyampaikan ketertarikan mereka pada informasi non-keuangan melalui laporan terintegrasi yang secara khusus dibuat untuk mereka
2. *Sustainability context*. Bagian penjelasan pada konteks keberlanjutan tertuang dalam laporan non-keuangan tetapi pengungkapan informasi masih tidak cukup untuk menunjukkan kontribusi nyata perusahaan.

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



3. *Materiality*. Hal yang sulit dinilai apakah topik material yang dipilih oleh perusahaan sudah memiliki tingkat relevansi yang diharapkan.
4. *Completeness*. Mayoritas perusahaan yang menggunakan panduan GRI sudah menjalankan penilaian mandiri sesuai aturan yang berlaku pada Standar GRI.
5. *Balance*. Mayoritas perusahaan hanya mengungkapkan informasi yang positif saja, meskipun sudah dijelaskan dalam panduan GRI bahwa kontribusi yang diharapkan ada pada laporan keberlanjutan mengungkapkan dampak positif dan negatif.
6. *Comparability*. Keterbandingan antar sektor sangat sulit dilakukan karena fleksibilitas yang disediakan oleh panduan GRI menghasilkan beragam pelaporan walaupun panduan yang digunakan sama.
7. *Accuracy*. Setiap perusahaan telah menyajikan informasi yang akurat dan terinci mengenai indikator kuantitatif dan di saat bersamaan mereka menyajikan pernyataan kualitatif yang tidak didukung oleh data dan informasi yang cukup.
8. *Timeliness*. Tidak ada persyaratan yang ditentukan untuk seberapa sering frekuensi pelaporan yang dibutuhkan, namun tendensi yang terjadi berbarengan dengan laporan tahunan.
9. *Clarity*. Keterbukaan dapat ditingkatkan bila perusahaan mampu secara jelas mengenalkan tujuan-tujuan apa saja yang ingin dicapai, apa yang sudah dicapai pada saat ini, dan langkah-langkah selanjutnya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
10. *Reliability*. Mayoritas laporan non-keuangan telah di audit oleh firma akuntan atau organisasi pihak ketiga lainnya.

Dalam Analisis Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Berdasarkan Prinsip Isi dan Kualitas yang diteliti oleh Firda Agustriyani (2017) dengan menggunakan variable dependen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sustainability Reporting (Y) dan variable independen 10 Prinsip Isi dan Kualitas ($X_1 - X_{10}$)

mengungkapkan berdasarkan prinsip isi, aspek pemangku kepentingan memiliki skor tertinggi dan aspek materialitas skor terendah. berdasarkan prinsip kualitas, aspek kejelasan memiliki skor tertinggi dan aspek keandalan skor terendah. Berdasarkan prinsip isi, aspek konteks keberlanjutan memiliki skor tertinggi dan aspek materialitas skor terendah, dan aspek akurasi memiliki kualitas skor pengungkapan tertinggi dan aspek keseimbangan terendah berdasarkan prinsip kualitas.

Studi kasus yang dibuat untuk menilai perkembangan prinsip isi dan kualitas menurut GRI (Global Reporting Initiative) Standard dalam laporan keberlanjutan perusahaan PT AKR Corporindo Tbk., PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk., PT Astra Internasional Tbk., dan PT Unilever Indonesia Tbk. untuk periode 2018-2020. Hasil studi menyimpulkan bahwa terdapat perkembangan positif penyampaian laporan keberlanjutan atas 12,67% dari total 713 emiten (Nelson, 2022)

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian pustaka terakit laporan keberlanjutan, kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

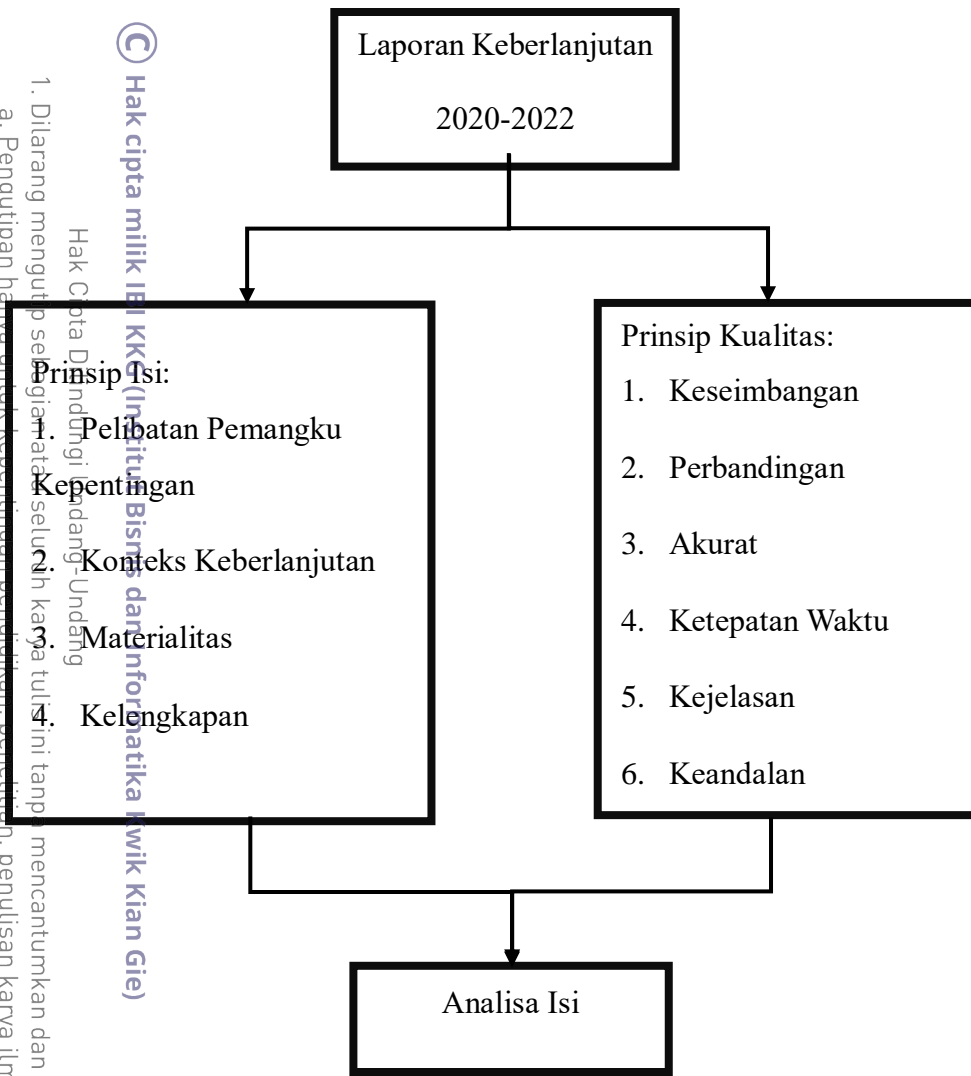
1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.4. Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Olahan (2024)

Gambar 2.4 menunjukkan dalam Laporan Keberlanjutan periode 2020-2022 yang dipublikasikan oleh setiap perusahaan sektor pelayaran yang diharapkan telah mengaplikasikan 10 prinsip isi dan kualitas yang dianjurkan oleh Standar GRI 2021 yang telah digunakan pada seluruh periode pelaporan efektif 1 Juli 2021 (Global Sustainability Standards Board, 2021). Dalam menjelaskan pengungkapan pada laporan keberlanjutan yang dilihat berdasarkan dari prinsip isi dan prinsip kualitas. Dimana pada setiap prinsip tersebut memiliki aspek-aspek dan



yang dispesifikasikan kedalam indikator pada setiap aspek untuk membantu memberikan penilaian pada laporan keberlanjutan. Sehingga pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis isi yang digunakan untuk menilai terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan-perusahaan Pelayaran di Indonesia yang melaporkan laporan keberlanjutan selama periode penelitian yaitu sejak tahun 2020 sampai dengan 2022.

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

